

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Sistem Pengendalian Laporan Keuangan

¹Nazariah Nasution, ²Yudi Prayoga, ³Marlina Siregar

¹Manajemen, Universitas Labuhanbatu, buyungoppo5@gmail.com

²Manajemen, Universitas Labuhanbatu, prayogayudi03@gmail.com

³Manajemen, Universitas Labuhanbatu, siregarmarlina447@gmail.com

Corresponding Mail Author : buyungoppo5@gmail.com

Abstract

This research is grouped on associative quantitative methods that are characterized by asking the relationship between two or more variables (Sugiono 2019 : 65) to determine the effect of the relationship of the independent variable with the dependent variable. With a sample of 90 respondents, as known as variable X1 is the utilization of regional financial information systems, variable X2 is the understanding of regional accounting standards and variable Y is the financial statement control system. Stated, Based on research that obtained Fhitung value of 26.811 is greater than 2.71 and sig. 0.000 < 0.05 indicates that the utilization of the regional financial information system (X1) and understanding of Government Accounting Standards (X2) simultaneously have a positive and significant effect on the financial statement control system (Y). And found that the value of R Square (R2) of 0.367. Which means that the financial statement control system can be explained by the variable utilization of regional financial information systems and understanding of government accounting standards by 36.7%, while the remaining 63.3% are influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: Utilization, Information Systems, Accounting Standards, Financial Statements.

Pendahuluan

Akuntabilitas diartikan sebagai suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam UU NO. 23 Tahun 2014 dan UU NO. 9 Tahun 2015 mengenai pemerintahan daerah. Laporan keuangan ialah bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam suatu entitas.

Sistem pengendalian internal menurut V. Wiratna Sujawni (2015:69) ialah sistem yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur yang ada dalam perusahaan, dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, menjaga keakuratan laporan keuangan, dan kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Suwardjono (2005) menyatakan tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non-bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan rasional mengenai alokasi dana ke organisasi tersebut. Peningkatan kualitas laporan keuangan, dimaksud agar dapat meningkatkan kredibilitas, menyajikan informasi lengkap dan sesuai, dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan

daerah. Menurut Kusri dan Andi Koniyo (2007:10) sistem informasi akuntansi keuangan ialah sistem informasi akuntansi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakainya dengan ketepatan waktu, fleksibilitas, dan daya audit.

Laporan keuangan yang telah sesuai disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), dapat dilihat, bahwa BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI Perwakilan Sumbar telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) semester II 2011 untuk 9 kabupaten/kota di Sumbar. Sejauh ini, belum terdapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semua daerah mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dimana masing-masing kabupaten Lima Puluh kota, kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh. (www.padangmedia.com). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009-2010 dan 2011. Untuk 3 tahun berturut-turut tersebut, pemerintah Kota Pariaman, BPK RI Perwakilan Sumbar memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), yang berarti adanya penurunan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2008, dimana Pemerintah Kota Pariaman memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi yaitu adanya inventarisasi aset seperti masalah tanah, persediaan barang dan aset yang belum memiliki penilaian atas umur piutang, belum diterapkannya metode ekuitas dalam penyertaan modal perusahaan, banyaknya perjalanan dinas fiktif, ketelambatan penyetoran pajak, dan lainnya (www.antarasumbar.com). Pada tahun 2011, terungkap kasus korupsi atas pengadaan tanah dalam fasilitas olahraga yang melibatkan Walikota Pariaman yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,3 milyar hal ini menunjukkan bahwa masih lemah pengawasan keuangan daerah di pemerintah Kota Pariaman (www.padangekspres.com).

Faktor terkait kualitas penyusunan dalam pengendalian laporan keuangan ialah kepatuhan dan pemahaman terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adanya keterbatasan SDM yang memahami proses penyusunan laporan keuangan sesuai SAP menjadi kendala dalam terciptanya LKPD yang berkualitas. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah dengan baik dan benar sesuai SAP yang berlaku. Faktor lain yang mempengaruhi ialah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dimana pemanfaatan sistem informasi ini faktor dalam mewujudkan laporan keuangan yang memiliki ketepatan waktu dalam penyajiannya serta informasi didalamnya dapat diandalkan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi dalam mendukung sistem informasi keuangan daerah, diberlakukannya penyusunan laporan keuangan yang akrual, pasti berbasis teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan internet, elektronik commerce dan jenis lain yang berhubungan dengan teknologi.

Landasan Teori

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu,

dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah menurut Krismiaji (2015:120) merupakan suatu sistem yang dapat memproses data dan transaksi yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan suatu bisnis agar dapat menghasilkan informasi yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam membuat sebuah keputusan. Kemanfaatan suatu teknologi informasi bagi pengguna dapat diukur oleh faktor penggunaan teknologi yang dapat menimbulkan produktivitas pengguna, penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna, serta penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna (Meuthia, 2008 dalam Gusforni, 2011).

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses dan dikelola oleh berbagai pihak serta masyarakat luas. Peraturan Pemerintah RI NO. 56 Tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. SIKD ialah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah sebagaimana memfokuskan peranan/pemanfaatan SIKD terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sebagaimana SIKD berhasil diterapkan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, informasi keuangan daerah yang disampaikan dalam pasal 2 mencakup :

- APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
- Neraca daerah
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan keuangan daerah
- Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- Laporan keuangan perusahaan daerah
- Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Menurut Sari (2014) indikator sistem informasi akuntansi keuangan daerah ialah :

- Tingkat kecepatan
- Tingkat ketepatan waktu
- Tingkat fleksibilitas
- Tingkat efisiensi biaya
- Tingkat daya audit
- Tingkat persepsi kegunaan

Tujuan penyelenggaraan SIKD ialah untuk :

1. Membantu menteri keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah.

2. Membantu menyediakan data dan informasi kepada sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD) pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
3. Membantu menteri keuangan dan instansi terkait dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan statistik keuangan negara.
4. Membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pemerintah, dan pembangunan daerah.
2. **Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar akuntansi ialah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Wulandari dan Muhammad, 2014). Standar akuntansi ini bermanfaat terhadap penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak luar organisasi.

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

Menurut Udiyanti,et al (2014), dimensi pemahaman standar akuntansi pemerintah, meliputi pemahaman terhadap :

1. Neraca
2. Penyajian laporan realisasi anggaran
3. Penyajian laporan arus kas
4. Penyajian CALK (penyajian laporan keuangan)
5. Catatan atas laporan keuangan
6. Penilaian persediaan
7. Pengakuan investasi
8. Pengakuan aset tetap
9. Perlakuan akuntansi konstruksi dan pengerjaan
10. Perlakuan akuntansi kewajiban
11. Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan
12. Laporan keuangan konsolidasian
13. Laporan operasional

Berdasarkan indikator diatas, bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berlaku dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas.

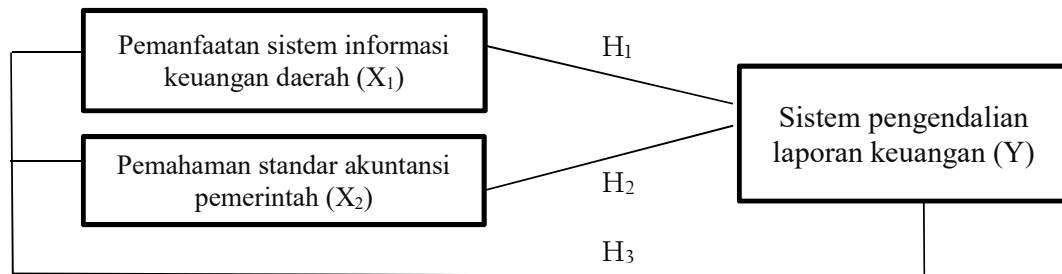
Dalam standar akuntansi memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi kepada penggunaan mengenai keuangan, hasil usaha, dan hal yang berkenaan dengan perusahaan.
2. Memberikan pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melakukan kegiatan audit dan menguji validasi laporan keuangan.
3. Memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel penting dalam mendukung pengenaan pajak, regulasi, perencanaan ekonomi dan peningkatan efisiensi serta tujuan sosial.
4. Menghasilkan prinsip dan teori bagi yang tertarik dengan disiplin akuntansi.
3. **Sistem Pengendalian Laporan Keuangan**

Menurut Mahmudi (2016:251) sistem pengendalian internal ialah proses tindakan dalam kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Pengendalian internal merupakan suatu sistem untuk memberi jaminan keamanan yang ada dalam suatu perusahaan meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Indikator sistem pengendalian pelaporan keuangan ialah :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Hipotesis

Hipotesis yang diduga bahwa :

- H₁ = Variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X₁) berpengaruh secara parsial terhadap variabel sistem pengendalian laporan keuangan (Y).
- H₂ = Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X₂) berpengaruh secara parsial terhadap variabel sistem pengendalian laporan keuangan (Y).
- H₃ = Variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X₁), dan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X₂) berpengaruh secara simultan terhadap variabel sistem pengendalian laporan keuangan (Y).

Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan pada metode kuantitatif asosiatif yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiono 2019 : 65) untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek populasi, yang mana sampel diambil berdasarkan rumus slovin sebanyak 89,92 dibulatkan menjadi 90 responden. Teknik sampling yang digunakan ialah teknik accidental sampling (berdasarkan kebetulan), artinya siapa saja dianggap cocok untuk digunakan sebagai sampel.

1. Metode Analisis Data

1. Keabsahan data yang diteliti dinilai dengan menggunakan Uji Validitas.
2. Uji reliabilitas Cronbach's Alpha mengukur tingkat reliabilitas kuesioner. Semakin tinggi koefisien alpha, semakin banyak data yang diperoleh.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen merupakan metode yang peneliti gunakan untuk menganalisis data. dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan di bawah ini:

$$Y = a + B1X_1 + B2X_2 + B3X_3$$

Ket :

- Y = Sistem pengendalian laporan keuangan
 a = Konstanta
 B1,B2 = Koefisien regresi untuk variabel bebas
 X1 = Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah
 X2 = Pemahaman standar akuntansi pemerintah

3. Uji F dan Uji T

- Uji F, apakah seluruh variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y.
- Uji T, menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X dengan variabel Y.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Hubungan antara besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel X dan variabel Y.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu data kuesioner. Berikut hasil uji validitas berdasarkan data yang telah diperoleh :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	No	r hitung	r tabel	Ket
Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X_1)	P1	0,870	0,207	Valid
	P2	0,880	0,207	Valid
	P3	0,851	0,207	Valid
Pemahaman standar akuntansi pemerintah (X_2)	P4	0,891	0,207	Valid
	P5	0,828	0,207	Valid
	P6	0,837	0,207	Valid
Sistem pengendalian laporan keuangan (Y)	P4	0,873	0,207	Valid
	P5	0,890	0,207	Valid
	P6	0,880	0,207	Valid

Sumber : Hasil pengolahan SPSS

Dapat dijelaskan, bahwa hasil yang didapat dari variabel X dan variabel Y dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r_{tabel} dengan sampel 90 berdasarkan signifikan 5% pada distribusi nilai r_{tabel} statistik diperoleh nilai sebesar 0,207.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan jumlah suatu indeks pada alat pengukur yang dapat dipercaya, ditunjukkan :

Tabel 2. Hasil Reliabilitas
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,832	9

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Dijelaskan bahwa Cronbach's alpha > 0,60 menunjukkan bahwa hasil reliabilitas sebelumnya dapat dipercaya. Data uji validitas dan reliabilitas di atas menunjukkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X_1) dan pemahaman sistem standar akuntansi pemerintah (X_2) berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap sistem pengendalian laporan keuangan (Y). Variabel terikat dan variabel bebas secara signifikan berkorelasi.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,292	1,285		4,119	,000
Pemanfaatan Sistem Informasi Laporan Keuangan Daerah	,647	,090	,638	7,196	,000
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	-,089	,097	-,081	-,916	,362

a. Dependent Variable: Sistem Pengendalian Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk menduga pengaruh data tersebut adalah :

$$Y = 5,292 + 0,647X_1 + -,089 X_2$$

Keterangan :

- Sistem pengendalian laporan keuangan (Y) memiliki nilai konstanta sebesar 5,292 jika pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X_1) dan pemahaman sistem standar akuntansi (X_2) tetap dengan nilai konstanta atau nol.
- Dengan koefisien regresi linier sebesar 0,647 maka pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian laporan keuangan (Y). Artinya sistem pengendalian laporan keuangan (Y) meningkat sebesar 0,647.
- Dengan koefisien regresi linier sebesar -0,089 maka pemahaman sistem standar akuntansi pemerintah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian laporan keuangan (Y). Artinya sistem pengendalian laporan keuangan (Y) meningkat sebesar -0,089.

4. Uji F (Uji Simultan)

Titik persentase distribusi (F tabel) dari 90 responden dirumuskan :

Pada, $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$ dengan $\alpha = 0,05$ yaitu 2,71

Tabel 4. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	133,807	2	66,903	26,811	,000 ^b
Residual	217,093	87	2,495		
Total	350,900	89			

A. Dependent Variable: Sistem Pengendalian Laporan Keuangan

B. Predictors: (Constant), Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 26,811 dari perhitungan uji statistik dengan sig. 0,000. Nilai F_{hitung} sebesar 26,811 lebih besar dari 2,71 dan sig. $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X_1) dan pemahaman standar akuntansi pemerintah (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian laporan keuangan (Y).

5. Uji T (Uji Parsial)

Titik persentase distribusi T yang di dapat dari 90 responden, DIRUMUSKAN :

$$Df = (n-k-1) = (90-3-1) = 86$$

$\alpha = 0,05$, maka t_{tabel} dari 86 yaitu 1,663

Tabel 5. Hasil Uji T (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,292	1,285		4,119	,000
Pemanfaatan Sistem Informasi Laporan Keuangan Daerah	,647	,090	,638	7,196	,000
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	-,089	,097	-,081	-,916	,362

A. Dependent Variable: Sistem Pengendalian Laporan Keuangan

A. Dependent Variable: Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

- Variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X_1), nilai t_{hitung} diperoleh 8,722 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan nilai t_{hitung} 7,196 > t_{hitung} 1,663 dengan taraf sig. $0,000 < 0,05$ yang artinya variabel X_1 secara parsial berpengaruh dan signifikan pada variabel laporan keuangan (Y), hal ini dinyatakan H_1 diterima.
- Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X_2), dengan nilai t_{hitung} -0,916 dan nilai signifikan 0,362. Dengan nilai t_{hitung} -0,916 < t_{hitung} 1,663 dengan

taraf sig. 0,040 > 0,05 yang artinya variabel X_2 secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan pada variabel laporan keuangan (Y), hal ini dinyatakan H_2 ditolak.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,618 ^a	,381	,367	1,57966

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Dari hasil di atas di dapatkan bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0,367. Yang berarti menunjukkan bahwa sistem pengendalian laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pemahaman standar akuntansi pemerintah sebesar 36,7%, sedangkan sisanya sebesar 63,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari pembahasan di atas:

1. Variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X_1), secara parsial berpengaruh dan signifikan oleh variabel sistem pengendalian laporan keuangan (Y).
2. Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X_2), secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan oleh variabel sistem pengendalian laporan keuangan (Y).
3. Variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X_1) dan pemahaman standar akuntansi pemerintah (X_2). berpengaruh dan signifikan secara simultan oleh variabel sistem pengendalian laporan keuangan (Y).

Saran

Saran dapat diajukan berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, seperti perlunya penelitian tambahan terkait faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pemahaman standar akuntansi pemerintah dalam melakukan sistem pengendalian laporan keuangan, karena dengan adanya tambahan penelitian dari yang sebelumnya dapat menyempurnakan temuan yang satu ini.

Daftar Pustaka

- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengalaman Kerja Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 3(1), 1–25.
- Jeklin, A. (2016). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. July, 1–23.
- Nurhasia Isman, Zainal Ruma, T. P. D. (2023). Jurnal Manajemen Jurnal Manajemen. *Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Image, Dan Testimoni Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Mie Instan Lemonilo Pada Media Sosial Instagram*, 2(1), 71–79.
- Lara. (2022). No Title 2005–2003, 8.5.2017, *הכרזת קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים*. www.aging-us.com
- Lingkungan, K., & Variabel, S. (n.d.). 6934-13389-1-Sm.
- Puspita, D., Fadli, F., & Halimatusyadiah, H. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma. *Jurnal Fairness*, 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i2.15247>
- Rohmah, L., Noor Shodiq Askandar, & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra, 0Pengaruh*(05), 43–51.